BAB IV

PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Munculnya kebijakan tentang tindakan afirmatif terhadap perempuan membuat partai politik melakukan penyesuaikan diri untuk memenuhi kuota perempuan sebanyak 30%. Keberadaan laki-laki yang dominan manunjukkan bahwa syarat 30% yang telah ditentukan hanya sebagai aturan tertulis saja sehingga tetap saja perempuan termarginalkan dalam kegiatan politik. Tindakan afirmatif terhadap perempuan membuat Partai Golkar, Partai Demokrat, PKB dan Partai Hanura harus memenuhi 30% keterlibatan perempuan sehingga yang tadinya partai hanya fokus menacari caleg-caleg berkualitas (tidak memperhatikan laki-laki/perempuan), kini partai-partai tersebut harus mencari caleg-caleg perempuan yang berkualitas.

Pada pemilihan legislatif 2014 di Kota Surabaya, partai politik menghadapi kesulitan dalam meningkatkan keterwakilan perempuan yaitu hambatan institusional, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), budaya patriarki dan keterbatasan finansial. Partai Demokrat melakukan penyesuaian dengan memberikan kesempatan kepada kader-kader perempuan untuk terlibat dalam kepengurusan sehingga peran perempuan semakin meningkat yang kemudian perempuan memenuhi kuota 30% sesuai peraturan misalnya dengan memberikan kesempatan untuk perempuan ber-argumen lebih banyak dalam rapat di kantor.

PKB dengan basis keagamaan lebih sulit menyesuaikan untuk melibatkan perempuan dalam kegiatan politik karena partai dengan tradisi keagamaan yang kuat sehingga menganut nilai-nilai politik bahwa laki-laki merupakan sosok pemimpin yang paling layak. Pemimpin yang baik menurut ideologi PKB adalah pemimpin yang mempunyai kecakapan, integritas tinggi, kharisma, ketangguhan dan menurut PKB sikap-sikap tersebut hanya dapat dimiliki oleh pemimpin laki-laki atau Kyai. Partai politik memiliki sistem politik yang berbeda-beda untuk mendapatkan anggota partai yang memiliki suatu kemampuan atau bakat yang sangat dibutuhkan untuk suatu jabatan atau fungsi politik.

Partai politik telah memenuhi kuota perempuan sebanyak 30% sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi partai untuk mengikuti pileg 2014 di Kota Surabaya namun pada kenyataannya hanya sedikit perempuan yang mendapat kursi kemenangan di legislatif. Partai Golkar meloloskan 3 perwakilan perempuan dari 17 jumlah total caleg, Partai Demokrat meloloskan 4 perwakilan perempuan dari 17 jumlah total caleg, PKB meloloskan 2 perwakilan perempuan dari 17 jumlah total caleg dan hanya 1 perwakilan perempuan Partai Hanura dari 16 jumlah total caleg. Masyarakat sebagai pemilih masih lebih percaya memberikan suaranya untuk caleg laki-laki karena dianggap lebih maksimal saat melakukan sosialisasi/kampanye dan menguasai masing-masing daerah pemilihan. Pemberlakuan kuota 30% keterwakilan perempuan merupakan salah satu upaya meningkatakan keterlibatan perempuan dalam kegiatan politik.

Tindakan afirmatif terhadap perempuan adalah sebagai upaya membuka kesempatan dan peluang yang sama dengan laki-laki untuk berparisipasi dalam

politik, baik secara individu maupun kelompok yang selama ini perempuan berada pada posisi marjinal dan terabaikan. Partai Golkar, Partai Demokrat, PKB dan Partai Hanura memiliki peran dan fungsi dalam meningkatkan keterwakialn perempuan pada pileg 2014 di Kota Surabaya yaitu dalam proses rekruitmen politik, pembekalan caleg, penempatan dapil yang tepat dan mencegah pencurian suara. Partai Golkar, Partai Demokrat, PKB dan Partai Hanura masih belum maksimal dalam menjalankan fungsinya sehingga hanya sedikit perempuan yang mampu memperoleh kemenangan di legislatif.

Semua partai politik membuka kesempatan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, tidak ada perbedaan antara laki-laki maupun perempuan, si kaya maupun si miskin atau aspek lain yang menjadi pembeda. Caleg-caleg yang ikut dalam pemilihan legislatif dilihat kualitasnya dari aspek dedikasi, kapabilitas, pendidikan dan kemampuan caleg untuk membangun inspirasi yang memerlukan multi pendekatan.

Berdasarkan teori kelembagaan partai politik menurut Randal Vicky dan Lars Svasand, Menurut partai Golkar sebagaimana yang telah dikatakan informan, partai sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan AD/ART yang telah disepakati bersama. Setiap peranan jabatan yang diemban dipertanggungjawabkan dengan menyelesaikan *job desk* masing-masing jabatan. Pada pemilihan legislatif tahun 2016 di Surabaya, Partai Golkar menjalankan fungsinya dengan mencari serta memenuhi kuota keterwakilan perempuan, menyelenggarakan pelatihan-pelatihan dan menjalankan organisasi-organisasi partai Golkar seperti AMG

(Angkatan Muda Golkar), KPPG (Kesatuan Perempuan Partai Golkar), AMPI (Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia) dan HWK (Himpunan Wanita Karya).

Kepengurusan Partai Demokrat di DPC Surabaya periode 2012-2017 tidak berjalan dengan baik karena pada pertengahan masa jabatan ketua DPC tersandung masalah dan diberhentikan sebagai Ketua. Informan di atas mengatakan bahwa antara ketua yang lama dengan pengurus lainnya tidak terjalin hubungan yang cukup baik ditandai dengan jarangnya ketua mendatangi kantor DPC sehingga ada beberapa program-program partai yang terhambat pelaksanaannya sementara struktur kepengurusan PKB di Surabaya periode 2009-2014 berjalan tanpa ada upaya lebih keras untuk memajukan partai karena PKB tidak banyak menjalankan program-program sesuai dengan jabatan. Divisi-divisi yang ada hanya berfungsi ketika menjelang pemilihan legislatif saja.

Partai Hanura di tingkat DPC Surabaya juga menjalankan job desk masing-msing setiap jabatan yang dipunya namun belum mampu memperluas citra partai dengan memberdayakan organisasi di partai atau mengandalkan tokoh-tokoh penting di dalam partai. Dari anlisis data diatas, Partai Golkar dan Partai Demokrat lebih memenuhi ke-4 proses dimensi proses pemantapan Randal Vicky dan Lars Svasand. Keberhasilan Partai Golkar dan Partai Demokrat dalam memantapkan partai mampu meningkatkan kualiatas partai secara keseluruhan.

IV.2 Saran

Partai politik merupakan organisasi yang dapat meningkatkan keterwakilan perempuan dan mendorong perempuan untuk meningkatkan kualitas diri untuk menjadi perwakilan masyarakat dan partai politik di parlemen. Partai Golkar, Partai Demokrat, PKB dan Partai Hanura sebagai subyek penelitian seharusnya dapat meningkatkan kinerja partai dalam mempersiapkan kader dan caleg-caleg agar dapat menjadi perwakilan masyarakat. Partai politik harus mampu memperlakukan semua caleg dengan adil tanpa melihat sumber daya, dalam hal ini sumber daya finansial yang merupakan sumber ketidakstabilan politik sehingga semakin sedikit jumlah perempuan yang tertarik masuk dalam kegiatan politik dan partai politik harus secepatnya mengakui keberadaan perempuan serta memberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk perempuan.